



# **BUPATI BIMA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 47);
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2019 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bima Nomor 98);
20. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 340);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2020.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Hari adalah hari kerja.

### **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

### Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	= Alokasi Formula setiap Desa
Z1	= rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Bima
Z2	= rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Bima
Z3	= rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Bima
Z4	= rasio tingkat kesulitan geografis (IKG) setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bima
AF Kab	= Alokasi Formula Kabupaten Bima

#### Pasal 10

Rincian Dana Desa di Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa, dengan ketentuan sbb :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
  - b. tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- (2) Penyaluran Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi tertulis dari Camat.
- (3) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Camat melakukan verifikasi teknis dan administratif rincian rencana penggunaan dana, laporan realisasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (8) Dalam hal Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa dana di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

### BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

#### Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :



- a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
  - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
  - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

#### Pasal 16

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi;
    - 4. informasi dan komunikasi; dan
    - 5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
    - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
    - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. penanganan bencana alam; dan
    - 3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
    - 1. konflik sosial; dan
    - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah.

#### Pasal 18

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi :
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 19

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 20

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), yaitu :
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
  - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), paling sedikit meliputi :
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 21

Perioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 20 dapat merujuk ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 25

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 26

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pengawasan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan permohonan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 28

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), setelah menerima :
  - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
  - b. putusan hukum pengadilan berkekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan permohonan penjelasan pada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima  
pada tanggal : 27-01-2020

**BUPATI BIMA,**

**ttd**

**Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI**

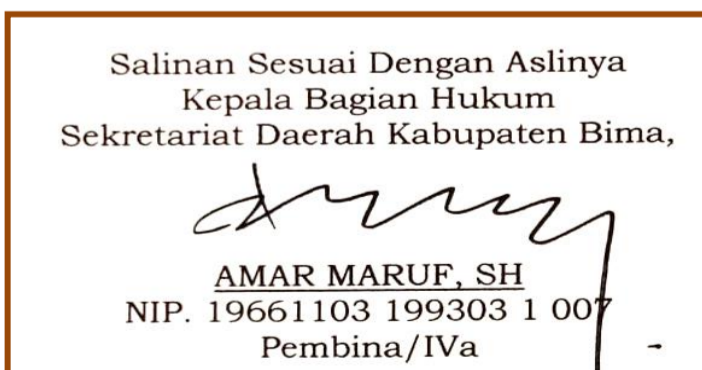
Diundangkan di : Bima  
pada tanggal : 27-01-2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,**

**ttd**

**H.M. TAUFIK HAK**

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2020 NOMOR 551



**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIMA**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 27 Januari 2020**

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
<b>I MONTA</b>							
1	Tolotangga	662,806,000	0	0	385,875,000	1,048,681,000	
2	Sondo	662,806,000	0	0	195,171,000	857,977,000	
3	Simpasai	662,806,000	0	0	358,938,000	1,021,744,000	
4	Sie	662,806,000	0	0	292,158,000	954,964,000	
5	Tangga	662,806,000	0	0	185,838,000	848,644,000	
6	Monta	662,806,000	0	0	273,251,000	936,057,000	
7	Sakuru	662,806,000	0	0	234,633,000	897,439,000	
8	Baralau	662,806,000	0	0	166,535,000	829,341,000	
9	Tolouwi	662,806,000	0	0	552,366,000	1,215,172,000	
10	Wilamaci	662,806,000	0	0	182,994,000	845,800,000	
11	Pela	662,806,000	0	0	231,182,000	893,988,000	
12	Tangga Baru	662,806,000	181,634,000	0	460,742,000	1,305,182,000	
13	Nontotera	662,806,000	0	0	197,947,000	860,753,000	
14	Waru	662,806,000	181,634,000	0	222,016,000	1,066,456,000	
		<b>9,279,284,000</b>	<b>363,268,000</b>	<b>0</b>	<b>3,939,646,000</b>	<b>13,582,198,000</b>	
<b>II BOLO</b>							
1	Tambe	662,806,000	0	144,096,000	733,564,000	1,540,466,000	
2	Rasabou	662,806,000	0	0	242,171,000	904,977,000	
3	Rato	662,806,000	0	0	164,023,000	826,829,000	
4	Kananga	662,806,000	0	144,096,000	152,221,000	959,123,000	
5	L e u	662,806,000	0	0	242,827,000	905,633,000	
6	Timu	662,806,000	0	0	296,691,000	959,497,000	
7	Bontokape	662,806,000	0	0	166,717,000	829,523,000	
8	Sondosia	662,806,000	0	0	168,406,000	831,212,000	
9	Nggembe	662,806,000	0	0	214,445,000	877,251,000	
10	Sanolo	662,806,000	0	0	243,971,000	906,777,000	
11	Tumpu	662,806,000	0	0	199,187,000	861,993,000	
12	Rada	662,806,000	0	0	199,439,000	862,245,000	
13	Kara	662,806,000	0	0	125,535,000	788,341,000	
14	Darussalam	662,806,000	0	0	208,516,000	871,322,000	
		<b>9,279,284,000</b>	<b>0</b>	<b>288,192,000</b>	<b>3,357,713,000</b>	<b>12,925,189,000</b>	
<b>III WOHA</b>							
1	Keli	662,806,000	181,634,000	0	374,433,000	1,218,873,000	
2	Tenga	662,806,000	0	0	131,896,000	794,702,000	
3	Tente	662,806,000	0	0	113,121,000	775,927,000	
4	Rabakodo	662,806,000	0	0	188,875,000	851,681,000	
5	Samili	662,806,000	181,634,000	0	386,491,000	1,230,931,000	
6	Kalampa	662,806,000	0	144,096,000	211,293,000	1,018,195,000	
7	Risa	662,806,000	181,634,000	0	331,686,000	1,176,126,000	
8	Pandai	662,806,000	0	144,096,000	224,270,000	1,031,172,000	
9	Donggobolo	662,806,000	0	0	150,031,000	812,837,000	
10	Dadibou	662,806,000	0	0	190,680,000	853,486,000	
11	Talabiu	662,806,000	0	0	201,623,000	864,429,000	
12	Naru	662,806,000	0	0	247,881,000	910,687,000	
13	Nisa	662,806,000	0	0	219,362,000	882,168,000	
14	Waduwani	662,806,000	0	0	88,672,000	751,478,000	
15	Penapali	662,806,000	0	0	208,927,000	871,733,000	
		<b>9,942,090,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>288,192,000</b>	<b>3,269,241,000</b>	<b>14,044,425,000</b>	
<b>IV BELO</b>							
1	Ncera	662,806,000	181,634,000	0	226,899,000	1,071,339,000	
2	Lido	662,806,000	0	144,096,000	134,595,000	941,497,000	
3	Ngali	662,806,000	0	0	245,358,000	908,164,000	
4	Renda	662,806,000	0	0	323,978,000	986,784,000	
5	Cenggu	662,806,000	0	144,096,000	99,515,000	906,417,000	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
6	Runggu	662,806,000	0	0	176,009,000	838,815,000	
7	Soki	662,806,000	0	0	170,751,000	833,557,000	
8	Roka	662,806,000	0	0	151,113,000	813,919,000	
9	Diha	662,806,000	0	0	107,279,000	770,085,000	
		<b>5,965,254,000</b>	<b>181,634,000</b>	<b>288,192,000</b>	<b>1,635,497,000</b>	<b>8,070,577,000</b>	
	<b>V WAWO</b>						
1	Tarlawi	662,806,000	0	0	195,187,000	857,993,000	
2	Ntori	662,806,000	0	0	209,875,000	872,681,000	
3	Maria	662,806,000	0	0	179,006,000	841,812,000	
4	Pesa	662,806,000	0	0	133,890,000	796,696,000	
5	Raba	662,806,000	0	0	248,066,000	910,872,000	
6	Kambilo	662,806,000	0	0	173,048,000	835,854,000	
7	Maria Utara	662,806,000	0	0	187,873,000	850,679,000	
8	Kombo	662,806,000	0	0	159,632,000	822,438,000	
9	Riamau	662,806,000	181,634,000	0	265,865,000	1,110,305,000	
		<b>5,965,254,000</b>	<b>181,634,000</b>	<b>0</b>	<b>1,752,442,000</b>	<b>7,899,330,000</b>	
	<b>VI SAPE</b>						
1	Sari	662,806,000	0	0	403,422,000	1,066,228,000	
2	Boke	662,806,000	0	0	130,781,000	793,587,000	
3	Jia	662,806,000	0	0	324,162,000	986,968,000	
4	Bugis	662,806,000	0	0	662,723,000	1,325,529,000	
5	Naru	662,806,000	0	0	204,178,000	866,984,000	
6	Rasabou	662,806,000	0	0	169,877,000	832,683,000	
7	Sangia	662,806,000	0	0	484,495,000	1,147,301,000	
8	Nae	662,806,000	0	0	168,364,000	831,170,000	
9	Rai Oi	662,806,000	0	0	272,009,000	934,815,000	
10	Parangina	662,806,000	181,634,000	0	495,219,000	1,339,659,000	
11	Kowo	662,806,000	0	0	413,842,000	1,076,648,000	
12	Buncu	662,806,000	181,634,000	0	493,403,000	1,337,843,000	
13	Poja	662,806,000	181,634,000	0	524,826,000	1,369,266,000	
14	Bajo Pulo	662,806,000	0	0	289,796,000	952,602,000	
15	Naru Barat	662,806,000	0	0	184,074,000	846,880,000	
16	Tanah Putih	662,806,000	0	0	170,410,000	833,216,000	
17	Lamere	662,806,000	0	0	503,051,000	1,165,857,000	
18	Oi Maci	662,806,000	0	0	91,129,000	753,935,000	
		<b>11,930,508,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>0</b>	<b>5,985,761,000</b>	<b>18,461,171,000</b>	
	<b>VII WERA</b>						
1	Ntoke	662,806,000	181,634,000	0	463,929,000	1,308,369,000	
2	Pai	662,806,000	0	0	519,084,000	1,181,890,000	
3	Nunggi	662,806,000	0	0	298,196,000	961,002,000	
4	Tawali	662,806,000	0	144,096,000	283,800,000	1,090,702,000	
5	Hidirasa	662,806,000	0	144,096,000	159,062,000	965,964,000	
6	Wora	662,806,000	0	0	416,025,000	1,078,831,000	
7	Sangiang	662,806,000	0	0	541,055,000	1,203,861,000	
8	Bala	662,806,000	0	0	406,900,000	1,069,706,000	
9	Oi Tui	662,806,000	181,634,000	0	250,344,000	1,094,784,000	
10	Tadewa	662,806,000	0	0	200,631,000	863,437,000	
11	Nanga Wera	662,806,000	0	0	352,082,000	1,014,888,000	
12	Rangasolo	662,806,000	0	0	128,991,000	791,797,000	
13	Kalajena	662,806,000	181,634,000	0	298,537,000	1,142,977,000	
14	Mandala	662,806,000	0	0	148,955,000	811,761,000	
		<b>9,279,284,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>288,192,000</b>	<b>4,467,591,000</b>	<b>14,579,969,000</b>	
	<b>VIII DONGGO</b>						
1	Doridungga	662,806,000	0	0	247,133,000	909,939,000	
2	Kala	662,806,000	0	0	199,555,000	862,361,000	
3	O'o	662,806,000	0	0	209,674,000	872,480,000	
4	Mbawa	662,806,000	181,634,000	0	752,411,000	1,596,851,000	
5	Palama	662,806,000	0	0	178,115,000	840,921,000	
6	Rora	662,806,000	0	0	172,763,000	835,569,000	

NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
7	Mpili	662,806,000	181,634,000	0	253,696,000	1,098,136,000	
8	Bumi Pajo	662,806,000	181,634,000	0	229,856,000	1,074,296,000	
9	Ndano NaE	662,806,000	0	0	237,044,000	899,850,000	
		<b>5,965,254,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>0</b>	<b>2,480,247,000</b>	<b>8,990,403,000</b>	
	<b>IX SANGGAR</b>						
1	Piong	662,806,000	0	0	253,878,000	916,684,000	
2	Boro	662,806,000	0	144,096,000	497,926,000	1,304,828,000	
3	Kore	662,806,000	0	0	291,532,000	954,338,000	
4	Taloko	662,806,000	0	144,096,000	404,543,000	1,211,445,000	
5	Oi Saro	662,806,000	0	0	144,195,000	807,001,000	
6	Sandue	662,806,000	0	0	236,627,000	899,433,000	
		<b>3,976,836,000</b>	<b>0</b>	<b>288,192,000</b>	<b>1,828,701,000</b>	<b>6,093,729,000</b>	
	<b>X AMBALAWI</b>						
1	Nipa	662,806,000	0	0	682,735,000	1,345,541,000	
2	Tolowata	662,806,000	0	144,096,000	330,409,000	1,137,311,000	
3	Rite	662,806,000	0	0	463,760,000	1,126,566,000	
4	Mawu	662,806,000	181,634,000	0	465,730,000	1,310,170,000	
5	Talapiti	662,806,000	181,634,000	0	335,716,000	1,180,156,000	
6	Kole	662,806,000	181,634,000	0	312,646,000	1,157,086,000	
		<b>3,976,836,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>144,096,000</b>	<b>2,590,996,000</b>	<b>7,256,830,000</b>	
	<b>XI LANGGUDU</b>						
1	Wworada	662,806,000	0	0	191,658,000	854,464,000	
2	Karumbu	662,806,000	0	0	232,394,000	895,200,000	
3	Rupe	662,806,000	0	144,096,000	202,701,000	1,009,603,000	
4	Kalodu	662,806,000	181,634,000	144,096,000	295,224,000	1,283,760,000	
5	Kawuwu	662,806,000	0	0	185,737,000	848,543,000	
6	Doro O'o	662,806,000	0	144,096,000	268,449,000	1,075,351,000	
7	Laju	662,806,000	181,634,000	0	426,363,000	1,270,803,000	
8	Kangga	662,806,000	181,634,000	0	218,109,000	1,062,549,000	
9	Karampi	662,806,000	0	0	399,436,000	1,062,242,000	
10	Waduruka	662,806,000	181,634,000	0	310,497,000	1,154,937,000	
11	Dumu	662,806,000	0	144,096,000	301,302,000	1,108,204,000	
12	Rompo	662,806,000	0	0	176,097,000	838,903,000	
13	Sarae Ruma	662,806,000	0	0	201,853,000	864,659,000	
14	Pusu	662,806,000	363,269,000	0	235,047,000	1,261,122,000	
15	Sambane	662,806,000	0	144,096,000	167,720,000	974,622,000	
		<b>9,942,090,000</b>	<b>1,089,805,000</b>	<b>720,480,000</b>	<b>3,812,587,000</b>	<b>15,564,962,000</b>	
	<b>XII LAMBU</b>						
1	Kaleo	662,806,000	0	0	200,298,000	863,104,000	
2	Simpasai	662,806,000	181,634,000	0	332,445,000	1,176,885,000	
3	Mangge	662,806,000	181,634,000	0	445,139,000	1,289,579,000	
4	Lanta	662,806,000	0	0	427,861,000	1,090,667,000	
5	Nggelu	662,806,000	363,269,000	0	571,069,000	1,597,144,000	
6	Rato	662,806,000	0	0	351,580,000	1,014,386,000	
7	Sumi	662,806,000	0	0	476,629,000	1,139,435,000	
8	Soro	662,806,000	181,634,000	0	590,398,000	1,434,838,000	
9	Lambu	662,806,000	181,634,000	0	414,871,000	1,259,311,000	
10	Hidirasa	662,806,000	363,269,000	0	305,429,000	1,331,504,000	
11	Lanta Barat	662,806,000	0	0	280,060,000	942,866,000	
12	Melayu	662,806,000	0	144,096,000	216,645,000	1,023,547,000	
13	Sangga	662,806,000	0	0	273,628,000	936,434,000	
14	Monta Baru	662,806,000	181,634,000	0	304,059,000	1,148,499,000	
		<b>9,279,284,000</b>	<b>1,634,708,000</b>	<b>144,096,000</b>	<b>5,190,111,000</b>	<b>16,248,199,000</b>	
	<b>XIII MADAPANGGA</b>						
1	Woro	662,806,000	0	0	358,395,000	1,021,201,000	
2	Campa	662,806,000	0	0	250,903,000	913,709,000	
3	Mpuri	662,806,000	0	0	139,649,000	802,455,000	
4	Ndano	662,806,000	0	0	122,066,000	784,872,000	
5	Monggo	662,806,000	0	0	212,183,000	874,989,000	
6	Dena	662,806,000	0	0	174,501,000	837,307,000	



NO	KECAMATAN / DESA	DANA DESA (DDS)				Jumlah DDS Per Desa	KET.
		ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA		
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5+6	8
7	Rade	662,806,000	0	144,096,000	285,564,000	1,092,466,000	
8	Tonda	662,806,000	0	0	147,354,000	810,160,000	
9	Bolo	662,806,000	0	0	222,607,000	885,413,000	
10	Mada Wau	662,806,000	0	0	120,956,000	783,762,000	
11	Ncandi	662,806,000	0	0	156,067,000	818,873,000	
		<b>7,290,866,000</b>	<b>0</b>	<b>144,096,000</b>	<b>2,190,245,000</b>	<b>9,625,207,000</b>	
<b>XIV TAMBORA</b>							
1	Labuan Kananga	662,806,000	0	0	299,025,000	961,831,000	
2	Kawinda Nae	662,806,000	0	0	1,376,210,000	2,039,016,000	
3	Kawinda Toi	662,806,000	181,634,000	0	284,322,000	1,128,762,000	
4	Oi Panihi	662,806,000	0	0	206,711,000	869,517,000	
5	Oi Bura	662,806,000	363,269,000	0	301,196,000	1,327,271,000	
6	Oi Katupa	662,806,000	0	0	214,427,000	877,233,000	
7	Rasabou	662,806,000	0	0	183,750,000	846,556,000	
		<b>4,639,642,000</b>	<b>544,903,000</b>	<b>0</b>	<b>2,865,641,000</b>	<b>8,050,186,000</b>	
<b>XV SOROMANDI</b>							
1	Bajo	662,806,000	0	144,096,000	251,588,000	1,058,490,000	
2	Punti	662,806,000	0	0	442,574,000	1,105,380,000	
3	Wadu Kopa	662,806,000	0	0	151,216,000	814,022,000	
4	Kananta	662,806,000	181,634,000	0	448,190,000	1,292,630,000	
5	Sai	662,806,000	181,634,000	0	424,268,000	1,268,708,000	
6	Sampungu	662,806,000	181,634,000	0	513,162,000	1,357,602,000	
7	Lewintana	662,806,000	0	0	155,520,000	818,326,000	
		<b>4,639,642,000</b>	<b>544,902,000</b>	<b>144,096,000</b>	<b>2,386,518,000</b>	<b>7,715,158,000</b>	
<b>XVI PARADO</b>							
1	Parado Wane	662,806,000	0	0	472,150,000	1,134,956,000	
2	Parado Rato	662,806,000	0	0	393,468,000	1,056,274,000	
3	Kuta	662,806,000	0	0	260,080,000	922,886,000	
4	Kanca	662,806,000	0	0	252,833,000	915,639,000	
5	Lere	662,806,000	0	0	256,473,000	919,279,000	
		<b>3,314,030,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,635,004,000</b>	<b>4,949,034,000</b>	
<b>XVII LAMBITU</b>							
1	Kaboro	662,806,000	0	0	122,048,000	784,854,000	
2	Kuta	662,806,000	0	0	141,161,000	803,967,000	
3	Sambori	662,806,000	181,634,000	0	247,100,000	1,091,540,000	
4	Teta	662,806,000	0	0	127,501,000	790,307,000	
5	Kaowa	662,806,000	0	0	120,071,000	782,877,000	
6	Londu	662,806,000	0	0	149,360,000	812,166,000	
		<b>3,976,836,000</b>	<b>181,634,000</b>	<b>0</b>	<b>907,241,000</b>	<b>5,065,711,000</b>	
<b>XVIII PALIBELO</b>							
1	Panda	662,806,000	0	0	253,865,000	916,671,000	
2	Belo	662,806,000	0	0	162,781,000	825,587,000	
3	Tonggondoa	662,806,000	0	0	153,608,000	816,414,000	
4	Tonggorisa	662,806,000	0	0	216,999,000	879,805,000	
5	Teke	662,806,000	0	0	198,335,000	861,141,000	
6	Ntonggu	662,806,000	0	0	583,855,000	1,246,661,000	
7	Nata	662,806,000	0	0	190,308,000	853,114,000	
8	Dore	662,806,000	0	0	106,823,000	769,629,000	
9	Roi	662,806,000	0	0	157,297,000	820,103,000	
10	Ragi	662,806,000	0	0	144,708,000	807,514,000	
11	Padolo	662,806,000	0	0	99,133,000	761,939,000	
12	Bre	662,806,000	0	0	113,644,000	776,450,000	
		<b>7,953,672,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,381,356,000</b>	<b>10,335,028,000</b>	
		<b>126,595,946,000</b>	<b>7,446,998,000</b>	<b>2,737,824,000</b>	<b>52,676,538,000</b>	<b>189,457,306,000</b>	

BUPATI BIMA,

ttd

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI